



# Opsi Relokasi untuk PKL Ahmad Dahlan

■ Pemkot Yogya Inventarisasi Pasar Tradisional Bagi Pedagang

**Satu sisi mereka juga sudah siap dipindah. Jadi, ketika mau mencari solusi, mau dimasukkan pasar, akan kami sesuaikan dengan kondisi pasar yang memungkinkan. Baik dari sisi dagangan, maupun keberadaan tempat di pasar yang mungkin dimasuki pedagang.**

Yunianto Dwi Sutono  
Kepala Disperindag Kota Yogyakarta

**YOGYA, TRIBUN** - Nasib Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan KHA Dahlan, Gondomanan, Kota Yogyakarta yang terdampak proyek revitalisasi pedestrian, belum menemukan titik temu. Sampai sejauh ini, Pemkot Yogyakarta masih berupaya mencari solusi terbaik bagi para pedagang. Salah satunya adalah membuka opsi relokasi.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Yogyakarta, Yunianto Dwi Sutono, mengatakan, pihaknya bisa mengambil kebijakan relokasi, seandainya pedagang bersedia. Tetapi, pemerintah tidak akan semena-mena dan memaksakan kehendak dalam pengambilan keputusan terkait hal tersebut.

Yang pasti kami bantu untuk mencari solusi. Pemerintah tidak akan semena-mena,

• ke halaman 15



**REVITALISASI** - Suasana pengerjaan proyek revitalisasi pedestrian Jalan KHA Dahlan, Gondomanan, Kota Yogya, Jumat (2/10).

## SOLUSI TERBAIK

Pemkot Yogyakarta tengah mencari solusi terbaik untuk PKL di Jalan KHA Dahlan, Gondomanan, Kota Yogyakarta.

Salah satu opsi yang akan dilakukan adalah relokasi bagi pedagang.

Relokasi akan dilaksanakan di beberapa pasar tradisional terdekat, agar mereka tetap bisa berjualan.

Pemkot tak akan memaksa para PKL untuk mengganti komoditas, atau barang dagangannya, jika nanti mendapat kios khusus jualan tertentu.

Beberapa opsi pasar di antaranya, Pasar Ngasem, Pasar Serangan, Pasar Pingit.

Para pedagang pun diminta tidak khawatir, karena beberapa slot di pasar yang menjadi opsi, sejauh ini masih kosong.

GRAFIS/SULUH PRASETYA

Kepala

| Instansi                | Nilai B                        |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. <b>Din. Perindag</b> | <input type="checkbox"/> Nega  |
| 2. ....                 | <input type="checkbox"/> Posit |
| 3. ....                 | <input type="checkbox"/> Netra |
| 4. ....                 |                                |
| 5. ....                 |                                |

✓ Netral

✓ Seagern

## Opsi Relokasi untuk PKL

• Sambungan Hal 9

kami kedepankan komunikasi," ujarnya, dikonfirmasi Jumat (2/10) siang.

Yunianto mengakui, penataan PKL merupakan kewenangan pemerintahan di tingkat kecamatan. Hanya saja, Disperindag tak mungkin lepas tangan. Oleh sebab itu, pihaknya membuka peluang bagi para pedagang untuk direlokasi ke pasar tradisional terdekat, agar tetap bisa berjualan.

"Satu sisi mereka juga sudah siap dipindah. Jadi, ketika mau mencari solusi, mau dimasukkan pasar, akan kami sesuaikan dengan kondisi pasar yang memungkinkan. Baik dari sisi dagangan, maupun keberadaan tempat di pasar yang mungkin dimasuki pedagang," ungkapnya.

Walau begitu, ia tidak menampik, kemungkinan pedagang bakal direlokasi menuju pasar di luar wilayah Gondomanan. Seperti diketahui ber-

sama, di kecamatan tersebut memang tidak ada pasar yang bisa dijadikan opsi bagi para PKL di Jalan KHA Dahlan untuk berjualan.

"Ya, memang, tapi kan ada Pasar Ngasem, terus Serangan juga. Kalau yang sedikit jauh, ada Pasar Pingit. Nah, itu bisa dimasukkan ke sana. Kami saling cari solusi, karena kalau dimasukkan Beringharjo sisi barat juga rasanya kurang pas ya," ucapnya.

Menurutnya, solusi tersebut juga sudah ditawarkan kepada para pedagang di Jalan Jenderal Sudirman, yang turut terdampak proyek revitalisasi pedestrian. Namun, dirinya mengatakan, pilihan yang tersedia untuk merelokasi PKL di kawasan tersebut memang terbilang lebih banyak.

"Kami sudah inventarisasi tempatnya. Jadi, tentu diupayakan dari beberapa pasar terdekat. Bisa Pasar Pingit, Karangwaru, atau Terban. Secara teknis, camat akan koordinasi dengan kami," tandasnya.

Para pedagang pun diminta tidak khawatir, karena bebe-

rapa slot di pasar yang menjadi opsi, sejauh ini masih ada kekosongan. Pihaknya juga tak akan memaksa para PKL untuk mengganti komoditas, atau barang dagangannya, jika nanti mendapat kios khusus jualan tertentu.

"Tidak harus demikian (mengganti komoditas dagangannya), kan ada dekresi untuk mencari solusi," pungkash Yunianto.

### Jalin komunikasi

Camat Gondomanan, Budi Santosa, masih menjalin koordinasi intensif dengan jajaran Disperindag Kota Yogyakarta untuk mencari solusi terbaik bagi para PKL di Jalan KHA Dahlan yang terdampak proyek revitalisasi pedestrian.

"Untuk sementara PKL libur selama pembangunan. Saat ini baru dibahas kelanjutannya bagaimana setelah pedestrian selesai," ujarnya.

Berdasar pantauan *Tribun Jogja*, pembongkaran trotoar di proyek yang berlangsung dari simpang Kantor Pos, sampai Ngabean itu, sudah tergarap hampir seluruhnya.

Sehingga, otomatis, para pedagang untuk sementara tidak dapat melanjutkan aktivitasnya.

"Kalau di wilayah Gondomanan ya, ada 30 pedagang yang terdampak proyek. Semuanya masih kita kaji, bagaimana kelanjutannya," ujarnya.

Budi mengakui, Pemkot Yogyakarta memang punya opsi untuk merelokasi para PKL di wilayahnya tersebut. Hanya saja, pihaknya tidak bisa mengambil keputusan, lantaran harus berkoordinasi dulu dengan Disperindag, sekaligus perwakilan dari pedagang.

Ia pun tidak menampik, sedikit banyak upaya relokasi ini masih terkendala minimnya opsi yang tersedia di wilayahnya. Bagaimana tidak, di Gondomanan, tak ada pasar tradisional yang memadai untuk menampung para pengusaha kecil menengah tersebut.

"Ya, betul, makanya kita masih koordinasikan dulu dengan Disperindag untuk hal itu," plungkasnya. (aka)

| Instansi                               | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|----------------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Kecamatan/Kemantren Gondomanan      | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan |              |        |                 |

Yogyakarta, 24 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005